

GERAKAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH GURUTTA AMBODALLE

Oleh;

Dr. KH. Helmi Ali Yafie

Pengantar

Almaghfuurulah Anregurutta KH. Abdurrahman Ambodale adalah sebuah fenomena. Almaghfuurulah fenomenal pada zamannya, dan untuk satu masa yang cukup panjang. Almaghfuurulah membangun sebuah gerakan pendidikan dan da'kawah, sebagai jawaban atas persoalan-persoalan (kelangkaan pendidikan dan dakwah dengan pesan keagamaan tertentu, yang berangkat dari pandangan keagamaan tertentu, yang lazim disebut ahlussunnah wal jama'ah) pada masanya. Gerakan itu kemudian yang kemudian diberi payung yang dikenal dengan nama Darud Da'wah wal Irsyad (selanjutnya di singkat DDI). Almaghrufuurulah seperti memberikan jawaban atas diskriminasi, atau paling tidak, kelangkaan pendidikan yang terjadi akibat penjajahan; dan tetap menjadi alternatif pada awal kemerdekaan sampai pada akhir tahun 1990an. Gerakan yang dibangun itu juga seperti seperti jawaban atas gerakan keagamaan yang tidak toleran terhadap perbedaan, tidak menghargai tradisi keagamaan yang tumbuh yang berbaur dengan tradisi-tradisi local dalam batas-batas tertentu. Almaghfuurulah juga bisa dikatakan mengambil bagian dari apa yang dimanatkan oleh UUD45, berupaya mewujudkan salah satu cita-cita ketika dan menjadi misi Negara Republik Indonesia berdiri, yakni mencerdaskan anak bangsa

Gerakan itu dimulai dalam sebuah bentuk pendidikan yang disebut *Madrasah Arabiyah Islamiyah*, disingkat MAI¹, di Mangkoso (Kabupaten Barru, sekarang). MAI adalah bentuk pendidikan yang terstruktur dan sistematis, dengan lingkungan belajar yang khas, yang dikenal pada masa itu. MAI muncul di beberapa tempat, di Sulawesi Selatan, tetapi berdiri sendiri-sendiri, tidak punya hubungan satu sama lain secara struktural. MAI Mangkoso lah yang memulai mendorong munculnya MAI atau bentuk-bentuk pendidikan yang menyerupai MAI diberbagai daerah dan terhubung satu sama lain, dengan gerak yang kurang lebih sama. Bentuk-bentuk pendidikan tersebut disebut gerakan, karena muncul pada waktu yang kurang lebih sama, dengan

¹ Tidak diketahui secara pasti kapan mulai munculnya penggunaan istilah Madrasah Arabiyah Islamiyah. Sebelumnya ada istilah Madrasah Amiriyah Islamiyah di Bone. Kalau di daerah lain, di Pulau Jawa misalnya, istilah Madrasah sudah digunakan berdampingan dengan istilah Pesantren, yang sudah ada sebelumnya. Dalam lidah bugis, MAI biasa juga disebut 'sikola ara' (sekolah Arab).

gerak yang kurang lebih sama, terhubung satu sama lain dalam urusan-urusan tertentu, seperti (pengadaan) guru dan kurikulum, tetapi masing-masing otonom; dalam arti diurus oleh masyarakat setempat. Mangkoso sendiri bisa dianggap inspirator atau fasilitator. Mangkoso memproduksi dan menyediakan guru, tenaga pengajar dan kurikulum, bagi sekolah-sekolah itu, yang memungkinkan bentuk-bentuk pendidikan yang muncul itu memiliki gerak kurang lebih sama. Sekolah-sekolah, dengan difasilitasi oleh Mangkoso, kemudian menyelenggarakan pertemuan rutin, tahunan, untuk menjaga saling hubungan dan keterkaitan satu sama lain.

Gerakan itu menjadi cikal bakal DDI, dan Tokoh utama dibalik semua itu, adalah Anreguttha KH. Abdurrahman Ambodalle (1900-1996), atau yang biasa dipanggil Anregurutta² atau Gurutta Ambodalle.

Cikal Bakal

Anregurutta KH. Abdurrahman Ambodalle³, memulai gerakannya di Mangkoso, tahun 1938, ketika diminta oleh Raja Soppeng Riaja⁴, H. Andi Muhammad Yusuf Andi Dagong, untuk memimpin pendidikan yang didirikannya. Pada awalnya dalam bentuk halaqah, mengngaji tudang (bahasa bugis) atau wetonan, lalu berkembang dalam bentuk *Madrasah Arabiyah Islamiyah* (selanjutnya disingkat MAI)

Pada awalnya Petta Soppeng, Raja Soppeng Riaja, sekitar tahun 1935, berinisiatif mendirikan mesjid di tiga tempat utama di daerah kekuasaannya itu, yakni Lapasu, Takkalsi dan Mangkoso⁵, untuk merespon gerakan keagamaan yang tidak toleran

² Gurutta atau Anregurutta dalam bahasa Bugis bisa berarti Mahaguru Kita. Gurutta, artinya guru kita. Ini panggilan khas (bahasa bugis) kepada seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu, yang dihormati karena karakternya yang kuat berpijak pada nilai-nilai agama, serta telah mengajari kita ilmu dan pengetahuan dan makna-makna nilai-nilai dan ajaran agama secara mendalam, baik langsung maupun tidak langsung, secara tulus.

³ Gurutta KH. Abdurrahman Ambodalle lahir sekitar tahun 1900, di Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, sekitar tujuh kilometer sebelah utara Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Anak tunggal dari pasangan Andi Ngati Daeng Patobo dan Andi Chandaradewi. Nama kecilnya adalah Ambodalle (dalam bahasa Bugis, ambo, artinya anak, dan; dalle artinya rezki; ambodalle maksudnya anak yang murah rezki). Nama Abdurrahman diberikan oleh salah seorang gurunya, yakni KH Muhammad Ishak. Kiai Ishaklah yang pertama mengajari Ambodalle Nahwu, sharaf dan Tajwid. Selanjutnya Ambodalle, belajar kepada Gurutta KH Muhammad As'ad bin Abdul Rasyid al Bugisy, biasa dipanggil Gurutta Saade, di Sengkang. Tidak lama berguru disana, karena kemampuannya dianggap mumpuni, dianggap (setelah diuji) sudah memenuhi segala syarat yang dibutuhkan, Gurutta Ambodalle diangkat menjadi asisten oleh Gurutta Saade. Sekitar tahun 1937-38, pada saat menjadi asisten Gurutta Saade, Gurutta Ambodalle ke Mekkah untuk memperdalam ilmunya.

⁴ Soppeng Riaja, artinya Soppeng Bagian Barat, maju dan menjadi kerajaan berdaulat sendiri, pada pertengahan abad 17 setelah Aruppalakka dari Bone berhasil mengalahkan Gowa; sebelumnya Soppeng Riaja adalah bagian dari taklukan Gowa. Belanda menaklukkan Soppeng Riaja, sekitar tahun 1905 dan menjadikannya daerah Swapraja, dan tetap membiarkan rajanya memerintah. Raja Soppeng Riaja, disebut Petta Soppeng.

⁵ Mangkoso, masa itu adalah Ibukota Kerajaan Soppeng Riaja, sekarang bagian dari Kabupaten Barru.

terhadap perbedaan. Tetapi tidak begitu memberikan efek. Masjid itu sepi pengunjung. Tentu itu merisaukan sang Raja. Maka kemudian dia mengundang tokoh-tokoh agama dari kaum tradisional untuk mencari jalan keluar. Muncul gagasan untuk membangun sebuah pendidikan, yang dalam bahasa bugis disebut *angngajiang*⁶. Setelah gagasan itu mendapat kesepakatan, pertanyaan kemudian, siapa yang akan memimpin institusi itu. Karena itu tidak akan bisa jalan jika tidak ditangani oleh orang yang tepat, yakni seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu. Sedangkan di daerah itu, di Mangkoso, belum ada yang dianggap memenuhi kualifikasi dan memiliki kapasitas memadai untuk kepentingan itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk meminta guru kepada Gurutta Saade⁷, di Sengkang, yang ketika itu memimpin lembaga pendidikan yang dianggap paling bergengsi pada masa itu, sebagai pencetak para ulama, di Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan nama MAI Sengkang⁸.

Bahkan mereka mengincar Gurutta Abdurrahman Ambodalle, yang ketika itu sudah menjadi orang kedua dari Gurutta Saade di Sengkang. Gurutta Ambodalle adalah orang yang sangat diandalkan oleh Gurutta Saade. Bahkan ada yang melihat bahwa kemajuan pendidikan yang dirintis dan diselenggarakan Gurutta Saade, terutama setelah berubah bentuk menjadi MAI, karena kecemerlangan Gurutta Ambodalle⁹. Namanya memang sudah mencuat sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu

⁶ *Angngajian*. dalam bahasa Bugis, artinya tempat mengaji. Istilah ini digunakan system pendidikan berbasis pada kajian kitab-kitab klasik, yang dipimpin seorang ulama, untuk pendalaman ilmu-ilmu agama (*tafaqahu fiddin*).

⁷ Gurutta KH Mohammad As'ad (1907-1952), biasa juga dipanggil Anregutttu Puang Aji Sade, atau Gurutta Saade, adalah ulama bugis, kelahiran Makkah. Anak dari Syekh Abd. Rasyid dan St. Zulaeha binti Abdurrahman. Gurutta Saade, ke tanah Bugis, sekitar tahun 1928, menetap di Sengkang, menyelenggarakan pengajian atau semacam pengkaderan ulama. Rata-rata usia murid-murid pertamanya lebih tua darinya. Gurutta Saade memang bisa disebut jenius di bidangnya. Ketika datang ke tanah bugis, dia baru berusia sekitar 21 tahun, dan telah menjadi Guru Besar. Uniknya, rata-rata muridnya kemudian juga menjadi Ulama dan Guru Besar yang tumbuh dengan karakter masing-masing yang berbeda dengannya—selain Gurutta Ambodalle, ada Gurutta Daud Ismail, Gurutta Pabbaja, Gurutta Yunus Maratang—yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Gurutta Ambodalle, salah seorang murid Gurutta Saade yang paling menonjol, tidak kalah jeniusnya dengan Gurutta Saade, kemudian berkembang menjadi Guru Besar yang tidak kalah cemerlangnya dengan gurunya sendiri. Gurutta Ambodalle berkembang dengan karakter (lebih Bugis) yang sangat berbeda dengan Gurutta Saade (yang lebih Arab).

⁸ Pendidikan yang dirintis oleh Gurutta Saade, pada awalnya dikembangkan dengan system halaqah, yang dalam bahasa bugis disebut *mangngaji tudang*, dimana murid duduk melingkari guru, untuk mendengar, menyimak, mengkaji, dan berdiskusi dengan gurunya, yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu; setiap selesai sholat lima waktu. Kemudian berkembang menjadi semacam sekolah yang mempunyai tingkatan klas, yakni Tahdiriyah, Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Sistem halaqah tetap berjalan untuk pendalaman dan kajian dan, karena muridnya terbatas, pendidikan itu tampak lebih menyerupai pendidikan kader Ulama. Pada mulanya pendidikan yang dikembangkan Gurutta Saade diselenggarakan di rumahnya. Kemudian, dipindahkan ke Masjid Raya Sengkang (sekarang), tahun 1931, setelah selesai dibangun oleh Raja Sengkang (Arung Matoa), Andi Cella Petta Patoloe. Setelah murid semakin bertambah banyak kemudian, atas anjuran Arung Matoa, pada tahun 1937, dikembangkan menjadi MAI.

⁹ Mereka mengincar Gurutta Ambodalle karena sudah mengetahui betul kualitasnya. Beberapa orang sudah pernah berhubungan dengan Gurutta Ambodalle. Disamping itu Gurutta Ambodalle sering berkunjung ke Pancana, tidak jauh dekat Mangkoso, ke rumah mertuanya dan mengajar disana.

agama yang tidak terukur. Sebenarnya sudah bisa diduga bahwa Gurutta Saade akan menolak permintaan mereka itu. Selain tidak mau melepaskan orang kepercayannya, Gurutta Saade juga memang tidak membolehkan adanya cabang di daerah lain, untuk menjaga kualitas pendidikan MAI Sengkang. Misi Raja Soppeng Riaja, memang tidak berhasil¹⁰. Utusan Mangkoso¹¹ gagal meyakinkan Gurutta Saade. Bahkan Gurutta Saade mengatakan kepada mereka bahwa kalau orang-orang Soppeng mau belajar dan mendalami agama, lebih baik datang ke Sengkang.

Tetapi Raja Soppeng Riaja tidak menyerah. Dia mengubah taktik. Sebelum ke Sengkang, dia mengutus orang untuk menemui Gurutta Abdurrahman Ambodalle. Gurutta Ambodalle, meskipun merespon dengan baik tawaran itu, mengatakan tidak bisa ke Mangkoso jika tidak mendapat persetujuan dari Gurutta Saade. Sikap Gurutta Ambodalle seperti itu sudah cukup bagi Raja Soppeng. Maka dia kembali mengutus orang-orang yang sama menemui Gurutta Saade. Mereka berdiplomasi, berargumentasi, yang membuat Gurutta Saade akhirnya menyerahkan keputusan itu kepada Gurutta Ambodalle. Ternyata Gurutta Ambodalle menerima permintaan (utusan) Raja Soppeng tersebut. Maka dengan berat hati Gurutta Saade terpaksa melepaskan Gurutta Ambodalle. Sesuai kesepekatan, pertengahan Desember 1938, Gurutta Ambodalle memboyong keluarganya ke Mangkoso. Beberapa santri senior, yang menjadi murid-muridnya seperti KH Amin Nashir, KH. Harunarrasyid, dan lain-lain juga ikut pindah bersama Gurutta Ambodalle.

Pendekatan Baru dalam Pendidikan (Pendidikan dalam bentuk Gerakan Pendidikan)

Gurutta Ambodalle mulai mengajar, dalam bentuk halaqah (mangngaji tudang), pada hari pertama kedatangannya, di Masjid Mangkoso. Baru beberapa hari kemudian, setelah melakukan seleksi untuk menentukan tingkatan, membuka klas dalam bentuk MAI.¹² Mula-mula hanya sekitar 40-60 orang. Tetapi, dari waktu ke waktu, terus

¹⁰ Karena memang sudah mulai populer, sebenarnya bukan hanya Soppeng Riaja, beberapa daerah lain, seperti Bone dan Palopo juga meminta Gurutta Ambodalle.

¹¹ Utusan Raja Soppeng terdiri dari : H. Kitta' (Qadli Soppeng Riaja), H. Husein dan Puang Baco.

¹² MAI Mangkoso tetap mengikuti system pendidikan klasikal MAI Sengkang, mengembangkan tiga tingkatan klas (Tahdiriyah, Ibtidaiyah dan Tsanawiyah). Tema-tema pendidikan, terutama setelah berjalan lancar, berpusat pada Al Qur'an, Tafsir, Hadist, Tauhid, Fikhi, Ushul Fikhi, Tarekh (sejarah). Sedangkan Bahasa Arab dan ilmu-ilmu alat seperti nahwu-sharaf, menjadi dasar pendidikan. Pelajaran akhlak banyak dikembangkan dalam bentuk praktek yang dituangkan dalam peraturan-peraturan sekolah dan klas, sedangkan da'wah, dalam bentuk praktek yang dilakukan pada hari tertentu. Tetap ada pengajian (pesantren) yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu; biasanya selesai sholat, Maghrib, Isya dan Subuh, untuk mendalami Tafsir, Hadist, Tauhid, Fikhi, Ushul Fikh dan Bahasa Arab, di Masjid Mangkoso (sekarang). Selain mengembangkan MAI, Gurutta juga secara khusus membina Jamiatul Huffadz, dalam arti mempunyai system dan pembina sendiri.

berkembang sampai mencapai sekitar 400-500 orang. MAI Mangkoso, dibawah kepemimpinan Gurutta Ambodalle, dibantu murid-muridnya¹³ yang menyertainya dari Sengkang, dalam waktu relatif singkat berkembang pesat, menjadi populer, melampaui MAI Sengkang. Murid-murid berdatangan dari berbagai daerah. Bahkan ada yang berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat (waktu itu masih bagian dari Sulawesi Selatan), Kalimantan dan Sumatera (Riau dan Jambi). Dalam hal pengelolaan pendidikan terjadi pembagian tugas antara Gurutta dan Raja Soppeng; Gurutta sepenuhnya bertanggung jawab dalam urusan pendidikan, sedangkan urusan logistic sepenuhnya adalah tanggung jawab Raja Soppeng, H. Muhammad Yusuf Andi Dagong.

Ada sesuatu yang tampak baru dikembangkan oleh Gurutta Ambodalle. Bermula adanya permintaan dari berbagai daerah agar dikirim muballigh dan penghafal al Qur'an untuk menjadi imam, terutama imam taraweh selama bulan Ramadhan. Tampaknya itu memberikan inspirasi kepada masyarakat setempat. Mereka menginginkan adanya sekolah-sekolah sejenis MAI Mangkoso di daerahnya. Setelah MAI Mangkoso menghasilkan lulusan yang mumpuni, setelah berjalan kurang lebih dua tiga tahun, mulailah muncul permintaan dari berbagai daerah agar dibantu membangun pendidikan sejenis MAI di daerahnya. Permintaan itu mendapat respon dari Gurutta Ambodalle, dengan catatan bahwa masyarakat setempat membuat (fisik) sekolahnya dan Mangkoso menyediakan guru-guru dan kurikulum. Dengan kata lain masyarakat setempatlah yang membangun dan membiayai sekolah-sekolah tersebut. Dengan kesepakatan seperti itu mulailah Gurutta mengirim guru-guru ke daerah-daerah, secara bergantian, sampai sekolah ditempat itu berdiri. Bahkan ketika permintaan semakin banyak, Gurutta juga mengirim santri yang masih duduk di kelas setingkat Tsanawiyah.¹⁴

Muncullah kemudian sekolah-sekolah MAI, atau semacam MAI, yang juga dikenal dengan nama sekolah Arab, diberbagai daerah, yang menjadi bagian dari MAI Mangkoso. Ini adalah sesuatu yang baru, yang belum dikenal sebelumnya. Pendidikan pun tumbuh dan menyebar diberbagai daerah, secara serempak. Tidak seperti

¹³ Murid-murid Gurutta Ambodalle yang ikut pindah ke Mangkoso, dari Sengkang, antara lain adalah : KH Amin Nashir, KH Harunarrasyid, KH Abdul Kadir Khalid, KH Abd. Hanan, KH. Zainudin, KH Aqib Siangka, KH Amberi Said, H. Haddad, KH Abd. Rahman Matammang, dan lain-lain.

¹⁴ Untuk mengatur pengiriman dan pertukaran guru-guru yang bertugas mengajar di luar dan di Mankoso, diadakanlah pertemuan rutin, setiap akhir tahun ajaran. Pertemuan itu diselenggarakan bersamaan dengan penyerahan ijazah bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan di klas Tsanawiyah. Perkembangan baru lainnya adalah, pada tahun 1942, dibuka klas Aliyah untuk menampung santri yang tamat di tingkat Tsanawiyah, yang ingin melanjutkan pendidikannya. Pada saat yang sama juga di buka klas khusus untuk anak perempuan, dan untuk kepentingan itu didatangkanlah Hj. Hafsa dari Rappang.

sebelumnya, terbatas di beberapa tempat saja, terutama di pusat-pusat kerajaan. Pada hal itu adalah masa-masa sulit, karena Indonesia masih berada dibawah penjajahan¹⁵. Dan penjajah, bangsa manapun, baik Belanda maupun Jepang, tidak mau melihat anak-anak negeri jajahannya menjadi pintar, apalagi kritis. Maka mereka mengawasi penyelenggaraan pendidikan itu dengan sangat ketat, tidak hanya di daerah tetapi juga di pusat-pusat pendidikan, seperti Mangkoso.

Menjadi DDI

Munculnya sekolah-sekolah sejenis MAI di daerah-daerah itu tampaknya memunculkan inspirasi Ulama di Sulawesi Selatan, dari kalangan *Ahlussunnah wal Jama'ah*, tentang sebuah gerakan pendidikan yang lebih efektif dan menyebar. Gerakan yang dibutuhkan untuk merespon persoalan-persoalan kelangkaan pendidikan, akibat penjajahan di satu sisi, dan, di lain sisi meningkatnya aktifitas gerakan kelompok keagamaan yang tidak memiliki toleransi kepada perbedaan, yang berpotensi menimbulkan konflik diantara masyarakat. Potensi konflik semakin terasa mengancam karena masa itu adalah masa ketika penjajah Belanda, dengan membonceng Sekutu, berusaha masuk kembali untuk mencengkram kukunya di Indonesia, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945. Belanda, yang membonceng Sekutu sebagai pemenang perang (atas Jepang), memberlakukan keadaan darurat perang, dan melakukan pengrusakan besar-besaran, yang memuncak sepanjang (akhir tahun) 1946 - (pertengahan tahun) 1947. Pemberlakuan keadaan darurat militer oleh Belanda, memberikan keleluasaan kepada Westerling¹⁶ mengganas di Sulawesi Selatan, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat. Rakyat yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajahan Jepang, menghadapi situasi yang lebih mencekam lagi. Mereka dipaksa saling menyodorkan nama, agar bebas dari cap ekstremis, untuk dibantai oleh Westerling.

Dalam keadaan seperti itu para ulama bergeliat mencoba mencari jalan untuk membicarakan cara mengemban misi agama, untuk masa depan yang lebih baik.

¹⁵ Masa penjajahan Belanda; kemudian, diselingi dengan Jepang, tahun 1942-1945; dan Belanda kembali masuk dengan membonceng sekutu, setelah Jepang Perang, dengan pendekatan sepenuhnya militer, sampai sekitar tahun 1948-49.

¹⁶ Remond Pierre Paul Westerling, biasa juga dipanggil 'si Turki', memimpin pasukan Depot Speciale Troepen (Depot Pasukan Khusus), melakukan pembantian di hampir semua daerah di Sulawesi Selatan, selama operasi militer yang disebut counter insurgency (penumpasan pemberontakan), sepanjang Desember 1946-Maret 1947, yang menghilangkan nyawa puluhan ribu rakyat Sulawesi Selatan. Korban Westerling di duga mencapai 40.000 jiwa orang. Itu adalah masa yang mencekam dan paling kelam dalam sejarah di Sulawesi Selatan.

Mereka kemudian sepakat untuk saling bertemu dan bermusyawarah¹⁷. Para Ulama sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan, yang di bungkus dengan atau membonceng perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW., untuk mengelabui penguasa militer Belanda. Pertemuan itu diselenggarakan di Wattang Soppeng, yang dipilih karena daerah itu sudah didatangi, sudah lepas dari pembantian Westerling. Acara itu terselenggara pada hari Jumat, 17 Februari 1947 (16 Rabi'ul Awwal 1366 H). Selesai Acara Maulid, mereka menggelar musyawarah¹⁸.

Banyak hal yang dibicarakan, tetapi terfokus pada pendidikan dan da'wah. Para ulama itu melihat bahwa pendekatan Gurutta Ambodalle, yang mengirim santri dan mendirikan sekolah diberbagai tempat, efektif untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Singkat cerita mereka sepakat untuk sebuah gerakan pendidikan dan da'wah, yang didukung oleh usaha-usaha sosial. Mereka juga sepakat bahwa untuk efektifnya gerakan itu perlu disupport oleh sebuah organisasi. Maka dibentuklah sebuah organisasi untuk memayungi gerakan tersebut, dan mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada Gurutta Ambodalle. Karena memang organisasi ini terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Gurutta Ambodalle

Beberapa nama diusulkan untuk gerakan itu¹⁹, dan yang kemudian disepakati adalah 'Darud Da'wah wal Irsyad', disingkat DDI. Nama itu diusulkan oleh Syekh Abdurrahman Firdaus²⁰, dan didukung oleh Gurutta Ambodalle. Tampaknya Syekh Abdurrahman Firdaus, dengan memunculkan nama itu, terinspirasi oleh gerakan

¹⁷ Pertemuan diinisiasi oleh KH.M. Daud Ismail (Soppeng), KH. Abdurrahman Ambodalle (Mangkoso), Syekh Abdurrahman Firdaus (Pare-Pare), dan KH. M. Abduh Pabbaja (Allekkuang). Untuk mempersiapkan kegiatan mereka membentuk panitia, yang disebut Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW., untuk mengelabui penguasa militer Belanda. Panitia terdiri dari : KH. Daud Ismail (Penasehat), HM Amin Latif (Ketua), HM. Karim Ali (Sekretaris), HM. Amin Zein (Bendahara), dan KH Abdurrahman Ambodalle (anggota).

¹⁸ Peserta yang hadir dalam pertemuan itu antara lain adalah : Syekh Abdurrahman Firdaus (Pare-Pare), KH Abdurrahman Ambodalle (Mangkoso), KH Daud Ismail (Qadli Soppeng), KH Tahir (Qadli Balanipa Sinjai), KH. M. Zainudin (Qadli Majene), KH.M. Kittab (Qadli Soppeng Riaja), KH.M. Jamaludin (Qadli Barru), KH.M. Ma'mun (Qadli Tinambung), H.A.M. Tahir Usman (Madrasah Al Hidayah Soppeng), KH. M. Abduh Pabbaja (Allekkuang), KH. Abdu Mu'in Yusuf (Qadli Sidenreng), KH Baharudin Syatha (Qadli Suppa), KH. Abdul Hafidz (Qadli Sawitto), dan beberapa Ulama senior lainnya.

¹⁹ Antara lain, yang diunggulkan, adalah 'Nashrul Haq', diusulkan oleh KH. Mohammad Abduh Pabbaja; 'al Urwatul Wusqa', diusulkan oleh HM. Tahir Usman, dan; 'Darud Da'wah wal Irsyad', diusulkan oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Tetapi yang disepakati adalah Darud Da'wah wal Irsyad. Menurut Syekh Abdurrahman Firdaus, nama itu merupakan tafaal dalam rangka penyebaran misi da'wah dan pendidikan. Darun artinya, rumah atau tempat atau pusat (penyiaran da'wah); Da'wah sendiri adalah ajakan atau panggilan (untuk memasuki rumah itu); Irsyad, artinya petunjuk (yang diperoleh melalui proses da'wah, disatu daerah, yang kemudian disusul dengan proses pendidikan). Dengan demikian Darud Da'wah wal Irsyad adalah suatu gerakan atau organisasi yang berfungsi mengajak manusia ke jalan yang benar, menurut ajaran Islam, kearah kebaikan dan keselamatan (dunia dan akhirat).

²⁰ Syekh Abdurrahman Firdaus adalah Ulama pengembara asal Makkah, yang kemudian tinggal menetap di Jampue, pinrang, kemudian Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Syekh Abdurrahman Firdaus meninggalkan Makkah, karena gerakan kelompok Wahhabi.

pendidikan Sayyid Rasyid Ridla²¹. MAI Mangkoso, dan beberapa MAI lainnya yang didirikan selama memimpin Mangkoso²², diintegrasikan ke dalam DDI. Dengan kata lain, MAI-MAI itulah yang pertama-tama menjadi basis dari gerakan yang bernaung dibawah DDI.

Untuk mengukuhkan keberadaan organisasi dirumuskan sebuah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang ditangani oleh KH Muhammad Abduh Pabbaja. Dibuat dalam Bahasa Arab. Untuk memudahkan, kemudian terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh KH M. Ali Yafie bersama KH Amin Nashir²³. Sejak lahirnya AD/ART tersebut, singkatan DDI juga resmi digunakan. Musyawarah Ulama di Watang Soppeng itu, juga membantu merumuskan struktur organisasi dan menetapkan pengurus. Untuk membantu Gurutta Ambodalle, ditetapkan Pabbaja sebagai Sekretaris (waktu itu istilah yang digunakan adalah Penulis), dan HM. Madani, sebagai Bendahara.²⁴

²¹ Sayyid Rasyid Ridla (1865-1935), ulama atau intelektual Islam asal Suriah, mengembang gerakan pendidikan yang memiliki nama sama dengan DDI (yakni Ad Da'wah wal Irsyad). Rasyid Ridla melihat negeri-negeri Islam terjajah Barat, karena mengabaikan pendidikan.

²² Gurutta Ambodalle tidak serta merta mengintegrasikan Mangkoso dan sekolah-sekolah MAI binaan Mangkoso, tetapi melalui musyawarah dengan guru-guru; dan MAI-MAI itulah yang pertama-tama menjadi basis gerakan DDI.

²³ Pada awalnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu berbahasa Arab, kemudian di Indonesia oleh KH. Ali Yafie, agar lebih mudah difahami oleh anggota-anggota DDI.

²⁴ Susunan lengkap Pengurus DDI yang pertama adalah : Ketua, H Abdurrahman Ambodalle; KetuaMuda, H. M. Daud Ismail; Penulis Satu, H M. Abduh Pabbaja; Penulis Dua, M. Ali Yafie, dan; Bendahara, HM. Madani. Pembantu-Pembantu terdiri dari : KH. Abdul Mu'in (Qadli Sidenreng), KH.M. Yunus Maratan, KH.M. Abdul Kadir (Qadli Maros), KH. M. Tahir (Qadli Balanipa Sinjai), S. Ali Mathar, KH. Abdul Hafid (Qadli Sawitto), KH. Baharudin Syatha (Qadli Suppa), KH. Kittab (Qadli Soppeng Riaja, H. Muchadi (Pangkajene), TNB (Pare-Pare). Penasehat, KH. M. As'ad Sengkang, Syekh H. Abdurrahman Firdaus, H. Zainudin (Jaksa Pare-Pare), dan M. Aqib Macasai.

GERAKAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ANREGURUTTA KH. ABDURRAHMAN AMBODALLE

Bagian kedua

Pengantar

Sebagaimana yang sudah disebutkan pada bagian pertama dari tulisan ini bahwa salah satu hal yang sangat menonjol dari Gurutta Ambodalle, yang membuat bisa disebut fenomenal, adalah dia membangun gerakan pendidikan dan dakwah, yang berbasis pada apa dikenal sebagai system pendidikan yang menyerupai pendidikan pesantren sekarang. Fenomenal karena sebelumnya tidak ada gerakan semacam itu, bukan hanya di Sulawesi Selatan tetapi mungkin juga di Indonesia. Gerakan yang dimulai di Mangkoso melalui MAI Mangkoso, tahun 1938, yang mendapat dukungan tanpa batas dari Raja Mangkoso. Gerakan yang menjadi jawaban atas kelangkaan pendidikan akibat penjajahan dan gerakan keagamaan yang tidak toleran kepada perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Gerakan yang bertumpu dan berpegang kepada nilai-nilai, ajaran dan padangan keagamaan ahlussunnah wal jama'ah. Gerakan tersebut kemudian, dengan dukungan ulama dan tokoh agama di Sulawesi Selatan, menjadi atau diberi payung yang bernama DDI, tahun 1947, agar lebih massif dan sistemis. Gurutta Ambodalle merintis dan membangun gerakannya pada masa penjajahan (Belanda dan Jepang) yang diskrimatif (dalam segala bidang) dan mengabaikan pendidikan masyarakat, dan ketika diproklamasikan sebagai DDI, menghadapi situasi yang lebih mencekam, karena Sulawesi Selatan berada dalam pemberlakuan keadaan darurat militer yang sangat kejam; masa ketika Westerling²⁵ mengganas di Sulawesi Selatan, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat.

Dengan gerakan yang dipimpinnya itu, Gurutta sesungguhnya telah mengambil bagian sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita republic Indonesia, ketika diproklamirkan.

²⁵ Remond Pierre Paul Westerling, biasa juga dipanggil 'si Turki', memimpin pasukan Depot Speciale Troepen (Depot Pasukan Khusus), melakukan pembantaian di hampir semua daerah di Sulawesi Selatan, selama operasi militer yang disebut counter insurgency (penumpasan pemberontakan), sepanjang Desember 1946-Maret 1947, yang menghilangkan nyawa puluhan ribu rakyat Sulawesi Selatan. Korban Westerling di duga mencapai 40.000 jiwa orang. Itu adalah masa yang mencekam dan paling kelam dalam sejarah di Sulawesi Selatan.

PERODE KEDUA KEJAYAAN

Ada satu masa DDI terlihat berjalan dengan irama harmonis. Improvisasi yang ada didalamnya sama sekali tidak terlihat mengganggu jalannya organisasi. Kondisi seperti itu terlihat mulai masa berdirinya sampai dengan masa awal Pemerintahan Orde Baru. Ada masa, DDI tidak dipimpin oleh Gurutta, yakni ketika diculik oleh DDTI, Kahar Muzakar. Meskipun menimbulkan shock, tetapi karena kesolidan generasi pertama itu, tidak mengganggu jalan organisasi, bahkan berkembang. Secara keseluruhan, mulai dari diproklamákannya, sampai kepada Gurutta memimpin kembali DDI, bisa disebut sebagai masa kejayaan DDI sebagai sebuah gerakan pendidikan. Pada masa-masa itu, DDI tampil dengan karakternya yang khas, sebagai gerakan pendidikan dan da'wah, yang bertumpu pada sebuah sistem pendidikan yang sekarang disebut pendidikan pesantren, dan tumbuh diberbagai daerah melampaui batas-batas wilayah propinsi. DDI bisa dikatakan meng-Indonesia. Kebesaran DDI pada masa itu mungkin hanya bisa diatasi oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Salah satu yang tampak menonjol pada masa-masa awal periode ini adalah hampir setiap tahun DDI menyelenggarakan Mukhtar. Mungkin juga itu dipengaruhi situasi sosial keagamaan masa itu, dimana benturan kepentingan antara kelompok tradisional, yang diwakili DDI, dengan gerakan puritanisme, sangat terasa, mengancam harmoni dalam masyarakat.

Dari Mangkoso ke Pare-Pare

Setelah pertemuan Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah di Wattangsoppeng, 1947 yang menghasilkan satu organisasi yang disebut Darud Da'wah wal Irsyad, disingkat DDI – untuk mendukung dan memayungi gerakan pendidikan yang telah dirintis oleh Gurutta Abdurrahman Ambodalle – setahun kemudian, 1948, organisasi muda itu menyelenggarakan Mukhtar yang pertama, di Pare-Pare. Mukhtar itu bisa dikatakan menggantikan posisi dan peran pertemuan rutin guru-guru dan pengurus MAI dan sekolah-sekolah yang dibina Gurutta Ambodalle selama periode Mangkoso. Isu-isu Mukhtar, berkisar pada pengintegrasian sekolah-sekolah dan pengurus sekolah binaan Gurutta, penertiban administrasi, serta pengukuhan pengurus dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tidak ada perubahan mendasar, kecuali adanya pergeseran posisi dalam struktur organisasi, yakni M. Ali Yafie menjadi Sekretaris umum, menggantikan posisi M. Abduh Pabbaja yang di geser ke posisi salah satu Kepala Bidang (Bidang Fatwa?). Sejak dari awalnya DDI sudah dirancang

untuk berkedudukan di Pare-Pare. Kota ini, pada masa itu adalah kota kedua sesudah Makasar untuk wilayah Sulawesi Selatan. Mempunyai posisi strategis²⁶, dengan penduduk yang heterogen²⁷, yang menguntungkan bagi perkembangan DDI kelak.

Sebelumnya Gurutta Ambodalle sudah diminta oleh Raja Mallusetasi²⁸, La Calo Andi Cambolang²⁹, menjadi Qadli Mallusetasi. Tawaran itu, dengan persetujuan Raja Soppeng Riaja, diterima oleh Qurutta Ambodalle. Raja Soppeng Riaja menyetujui permintaan itu, mungkin karena jarak antara Pare-Pare dan Mangkoso tidak begitu jauh, hanya sekitar 35 Km; memungkinkan Gurutta (yang waktu itu masih tinggal di Mankoso) pulang-pergi tanpa banyak kesulitan. Tetapi pertimbangan yang lebih mendasar tampaknya adalah bahwa Qadli pada masa itu adalah posisi yang strategis³⁰, sangat menguntungkan bagi perkembangan DDI.

Gurutta Ambodalle, meskipun sudah menjadi Qadli Mallusetasi, masih tinggal di Mangkoso. Setiap hari dia mondar-mandir Pare-Pare-Mangkoso, dengan (dibonceng) Sepeda. DDI sendiri sudah berkantor di Pare-Pare. DDI, tampaknya karena posisi Guruttasebagai Qadli, memperoleh kantor yang respresentatif (untuk zamannya)³¹, berlokasi di pusat kota, dekat Mesjid Jamik Pare-Pare (sekarang). Pada tahun 1949, DDI menyelenggarakan Muktamarnya yang kedua di Pare-Pare, dan, tahun 1950, Muktamar ke tiga di Makasar. Tidak ada perubahan mendasar, kecuali bahwa Pare-Pare semakin mengukuhkan diri sebagai pusat DDI.

Berturut-turut DDI menyelenggarakan Muktamar ke empat, tahun 1952, dan Muktamar ke lima, 1953, di Pare-Pare³². Pada masa-masa itu juga Gurutta resmi pindah

²⁶ Pada masa itu Pare-Pare (sekarang kotamadya Pare-Pare) adalah kota perdagangan, merupakan daerah transit, yang menghubungkan berbagai kota, terutama di pantai barat Sulawesi. Pare-Pare mempunyai pelabuhan (laut lepas) dengan kapasitas hanya dibawah pelabuhan makasar, yang bisa menampung kapal-kapal besar, bisa disebut pintu gerbang (dari laut) untuk masuk ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan bagian utara.

²⁷ Hampir seluruh anak suku, terutama bugis, mandar dan toraja, dengan tradisinya masing-masing ada di Pare-Pare .

²⁸ Wilayah Kerjaan Mallusetasi pada masa itu adalah Kota Pare-Pare (Bojo, Bacukiki dan Soreang). Mallusetasi, Nepo dan Palanro yang kini masuk wilayah Kabupaten Barru. Mallusetasi sekarang ada sebuah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barru.

²⁹ Raja terakhir dari Kerajaan Mallusetasi.

³⁰ Kedudukan Qadli di masa ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi sangat tinggi, hanya raja yang ada diatasnya; tapi dalam urusan agama, jabatan Qadli adalah yang tertinggi dalam sebuah wilayah kerajaan. Mungkin karena itu, jabatan Qadli kebanyakan dipegang oleh berabat terdekat raja; tentu yang memiliki keahlian dan kedalaman dalam ilmu agama, terutama Fiqh.

³¹ Letaknya disebelah selatan Mesjid Raya Pare-Pare (sekarang). Kantor itu kemudian dipindahkan ke Ujung Baru, setelah bangun kantor Baru, bangunan sekolah, dan rumah untuk Gurutta selesai dibangun, didaerah itu, diatas tanah yang memang disiapkan untuk kepentingan itu. Rumah kediaman Gurutta, terletak persis dibelakang bangunan sekolah dan kantor DDI.

³² DDI menyelenggarakan Muktamar setiap tahun, mungkin tampak aneh sekarang (seolah-olah waktu habis hanya untuk Muktamar), tetapi bagi DDI itu bukanlah hal yang aneh. Sebab itu adalah tradisi yang sudah ada sejak MAI Mangkoso, yakni pertemuan yang melibat guru-guru dari seluruh daerah dimana ada sekolah DDI untuk mengatur

ke Pare-Pare, setelah rumahnya yang disiapkan untuknya selesai dibangun, pada saat yang hampir bersamaan dengan rampungnya pembangunan sekolah yang didirikan memang untuk DDI, di Ujung Baru, Pare-Pare. Setelah pindah ke Pare-Pare Gurutta menyerahkan kepemimpinan Pesantren DDI Mangkoso kepada KH Amberi Said³³, dan DDI Mangkoso, diberikan status (cabang) otonom.

Pada saat itu Pelan-pelan pesantren DDI di Pare-Pare tumbuh menjadi pilar gerakan pendidikan DDI, mulai memproduksi guru-guru—berdampingan dengan Mangkoso sebagai wadah menggodok guru-guru—yang dikirim ke daerah-daerah untuk memperkuat pendidikan di daerah, atau melayani permintaan daerah-daerah yang minta didukung dengan dikirimi guru atau tenaga untuk membangun sekolah disana.

Perkembangan lain adalah DDI ketika sudah dilengkapi dengan Badan-badan otonom dan lembaga, seperti Fitiyatud Da'wh wal Irsyad (FiDI) yang bergerak dalam bidang Kepemudaan dan Kepanduan; Fatayanud Da'wah wal Irsyad (FaDI)³⁴ yang bergerak dengan dan menggorganisir perempuan muda; Ummahatud Da'wah wal Irsyad (UMMAHAT)³⁵, yang bergerak dan mengorganisir Perempuan dan Ibu-Ibu.³⁶ Beberapa tokoh perempuan DDI seperti Hj. Andi Bunayya dan Andi Syuhada muncul pada periode ini.

Diculik DI-TII Kahar Muzakkar

Di puncak kegairahannya berorganisasi, beberapa bulan sebelum Mukhtamar keenam, 1955, terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengguncang masyarakat DDI. Gurutta Abdurrahman Ambodalle, dalam perjalanannya menuju Makasar, dihadang dan diculik oleh gerombolan DI-TII. Meskipun peristiwa itu cukup mengguncangkan DDI, tetapi organisasi tetap berjalan, karena kepemimpinan DDI tetap terjaga. KH. M. Pabbaja untuk sementara didaulat menggantikan posisi Gurutta. Posisi KH. M. Pabbaja

perputaran penugasan guru-guru disekolah-sekolah tersebut; disamping melakukan evaluasi. Mukhtamar tahunan itu sama sekali tidak mengganggu, bahkan membuatnya lebih efektif, jalan dan laju perkembangan organisasi.

³³ KH Amberi Said, adalah salah seorang murid Gurutta, yang selalu mendampingi, bahkan dipercaya untuk menggantikan jika tidak ada ditempat, mengatur persoalan-persoalan internal Pesantren selama masa MAI Mangkoso. Pada saat itu juga KH Amberi Said diangkat menjadi Imam Masjid Raya Mangkoso.

³⁴ Kurang lebih seperti Fatayat di NU.

³⁵ Kurang lebih seperti Muslimat di NU.

³⁶ Semua itu dikelola dan diatur oleh apa yang disebut Dewan Perguruan. Dewan Perguruan ini juga mengatur pengangkatan dan penyusunan kurikulum sekolah dan madrasah. Badan-badan otonom itu bergerak aktif mendinamisir komunitasnya masing-masing, dalam rangka perbaikan kualitas kehidupan dan pandangan keagamaan mereka. Badan-badan otonom bagian dari upaya DDI untuk mengimbangi kelompok-kelompok keagamaan yang tidak toleran terhadap perbedaan, yang masa itu sangat agersif.

dikukuhkan pada Muktamar keenam, dipilih untuk menjadi ketua Umum, dan KH. Abd. Hakim Lukman ditetapkan sebagai Sekretaris Umum, untuk periode 1955-1957. Muktamar berikutnya, yang ketujuh, diselenggarakan di Pangkajene, Sidrap, menghasilkan kepemimpinan yang sama.

Baru pada pada Mukatamar kedelapan, tahun 1959, di Pinrang, Sawitto, KH.M. Ali Yafie dipilih sebagai ketua Umum, dan Muhammad Nur Hay ditetapkan sebagai Sekretaris Umum. Pada Muktamar kesembilan, 1962, di Pare-Pare, kembali KH.M. Ali Yafie³⁷ dipilih sebagai Ketua Umum, dan Petta Tanetting Syamsudin³⁸ diangkat sebagai Sekretaris Umum, untuk kepengurusan 1962-1965.

Keluar dari Hutan

Tahun 1964, setelah gerombolan DI-TII terdesak – dan kemudian takluk kepada Pemerintah RI, setelah Kahar Muzakkar tertembak mati – Gurutta Abdurrahman Ambodalle keluar dari hutan, setelah selama delapan tahun tinggal bersama DI-TII disana. Hal itu tentu saja di sambut dengan gembira oleh masyarakat DDI. Tidak lama berselang, KH. M. Ali Yafie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum, bersama kawan-kawannya, berinsiatif segera menyelenggarakan semacam pertemuan besar dengan mengundang dan menghadirkan hampir seluruh tokoh-tokoh DDI masa itu, di Makasar³⁹. Hanya ada satu acara tunggal dalam pada acara itu. KH.M. Ali Yafie, dengan persetujuan peserta yang hadir, menyerahkan Jabatan Ketua Umum kepada Gurutta Ambodalle. Pertemuan itu kemudian mengukuhkan Gurutta sebagai Ketua Umum seumur hidup⁴⁰. Selanjutnya Gurutta Ambodalle, dengan di dampingi oleh Petta Tanetting sebagai sekretaris, kembali memimpin DDI, sampai Muktamar berikutnya. Pada pertemuan ini juga dikenalkan fungsi baru dalam struktur DDI, yang disebut Majelis Pembina⁴¹, yang dipimpin oleh KH. M. Ali Yafie.

³⁷³⁷ Pada waktu itu, KH. M. Ali Yafie (sejak tahun 1960) sudah pindah ke Makasar. Sekitar tahun 1959 KH. M. Ali Yafie, oleh Departemen Agama di angkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Indonesia Timur. Karena harus pindah ke Makasar. Jadi harus mondar-mandir Makasar-Pare-Pare.

³⁸ Tanetting Syamsudin dikenal sebagai tokoh muda yang menonjol, ahli dalam bahasa Inggris.

³⁹ Pertemuan itu, kemudian dibelakang hari disebut sebagai Muktamar Luar Biasa dan dianggap sebagai Muktamar kesepuluh.

⁴⁰ Entah siapa yang mengusulkan, tetapi zaman itu, zaman akhir kekuasaan Orde Lama, dibawah kepemimpinan Soekarno. Tetapi terlepas dari kecenderungan seperti itu, orang-orang DDI melihat bahwa itu masa-masa transisi, masa perubahan menuju zaman baru, dari Orde Lama ke Orde Baru, dan itu membutuhkan figur pemersatu, yang memiliki loyalitas tunggal kepada misi, totalitas dalam pengabdian dan keikhlasan.

⁴¹ Berbeda dengan fungsi Dewan Pembina yang dikenal sejak zaman Orde Baru, fungsi Majelis Pembina lebih pada konsultan bagi PBDDI.

SKETSA GERAKAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH GURUTTA AMBODALLE

Bagian ketiga

Karakter Gurutta

Gambar Pertama

Pertengahan tahun 1950-an, ketika DDI berada di puncak-puncak kegiatannya sebagai gerakan pendidikan dan da'wah, Gurutta di culik oleh DI/TII Kahar Muzakkar⁴².

Gurutta di culik di daerah desa Belang-belang Kabupaten Maros. dalam sebuah perjalanan menuju Makasar, dari Pare-pare. Konon Gurutta ke Makasar dalam rangka mengurus pendirian sebuah perguruan tinggi DDI⁴³. Kehidupan di hutan bukanlah suatu yang menyenangkan; apalagi bersama dengan DI/TII, yang dicap sebagai pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Gurutta harus berpindah satu tempat ke

⁴² Abdul Kahar Muzakkar (1921-1965), pada awalnya adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan RI, asal Luwu, Sulawesi Selatan. Setelah RI merdeka, dia menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terakhir, sebelum masuk hutan, berpangkat Letnan Kolonel atau Overste pada masa itu. Konon, pada menjelang dan awal kemerdekaan RI, Kahar memiliki hubungan sangat dekat dengan Soekarno, Presiden pertama RI. Dia menjadi pengawal Bung Karno (sebutan populer Soekarno) dan tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia (BKI). Tetapi kemudian Kahar Muzakkar tidak setuju dengan beberapa kebijakan Presiden Soekarno, lalu berbalik menentang pemerintah pusat dan mengangkat senjata melawannya. Maka oleh pemerintah pusat dia dinyatakan sebagai pembangkang dan pemberontak. Pada awal tahun 1950-an, dia masuk hutan dan memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara lalu mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII), yang kemudian—setelah bergabung dengan Darul Islam (DI) Kartosoewiryo, yang berbasis di Jawa Barat—dikenal dengan nama DI/TII. DI/TII Kahar Muzakkar, melakukan perlawanan kepada Pemerintah RI sampai pada awal atau pertengahan tahun 1960-an. Perlawanan Kahar Muzakkar bersama DI/TII berakhir setelah ditumpas, melalui Operasi Militer yang disebut Operasi Tumpas. Dia tertembak mati dalam sebuah pertempuran di daerah yang disebut Lasolo, Sulawesi Selatan. Tentang Kahar Muzakkar, bisa dibaca diberbagai buku, dan artikel di beberapa Koran.

⁴³ Mobil Gurutta dicegat, pada 18 Juli 1955, di Desa Belang-belang Kabupaten Maros oleh sekelompok pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, bersenjata lengkap, yang dipimpin komandan Nurdin Pisok. Para pencegat itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Gurutta untuk berbicara. Mereka langsung membawa Gurutta ke hutan ke sebuah daerah terpencil. Sebenarnya sudah ada beberapa kali upaya menculik Gurutta, tetapi selalu gagal. Konon rencana penculikan itu sudah lama di rancang. Keberadaan Gurutta di hutan memberikan legitimasi bagi gerakan DI/TII, dalam upaya membentuk negara atas nama Islam.

tempat lain⁴⁴. Tetapi Gurutta adalah orang yang setia kepada cita-citanya, dengan sepenuh hati berusaha mewujudkannya. Maka, untuk kepentingan itu, dia seperti tidak mengenal waktu, situasi dan tempat. Ketika dia di hutan, dalam situasi sulit dan keadaan terbatas Gurutta tetap mengajar dan mendidik orang. Gurutta seperti menikmati proses pendidikan itu sebagai proses kehidupan. Itu yang membuatnya bisa bertahan di hutan. Bahkan di hutan, tentu dengan persetujuan Kahar Muzakkar, sempat mendirikan beberapa sekolah di beberapa tempat⁴⁵. Di hutan, hampir pasti Gurutta mengalami tekanan. Tidak hanya karena kondisi lingkungan fisik yang sangat sederhana, kehidupan sehari-hari yang terbatas dan tidak teratur; harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari operasi militer TNI. Tetapi juga karena konflik-konflik yang terjadi disekitarnya, dan konfliknya sendiri dengan Kahar Muzakkar⁴⁶. Boleh jadi memang dalam beberapa hal Gurutta sejalan dengan Kahar Muzakkar. Tetapi jelas bahwa pandangan keagamaan keduanya berbeda; bahkan pada titik tertentu, bertentangan. Karena perbedaan pandangannya dengan Kahar Muzakkar, Gurutta dipindahkan atau mungkin tepat diasingkan ke daerah Sulawesi Tenggara⁴⁷. Tetapi semua itu tidak mengendorkan semangatnya untuk

⁴⁴ Dari daerah Maros, Gurutta dibawa ke daerah Luwu, di tempatkan di Desa Ranteballa, sebuah Kampung dibawah Gunung Latimojong. Beberapa waktu kemudian, sekitar tahun 1957 Gurutta di pindahkan ke Kampong Soro, Wajo; dekat Maroanging. Konon tinggal disitu selama kurang lebih dua tahun. Lalu kembali ke dipindahkan ke daerah Luwu, ditempatkan di Bajo, Palopo Selatan. Disitu tinggal selama kurang lebih dua tahun. Karena dianggap tidak aman, Gurutta kemudian di pindahkan ke Sumpakburungang, Wajo. Terakhir Gurutta di bawa ke daerah Sulawesi Tenggara. Selama kurang lebih delapan tahun hidup seperti itu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tahun 1963, Gurutta dibawah dikembali ke kota oleh TNI. Pada bulan-bulan pertama kehidupan Gurutta di hutan betul-betul berat. Hidup sendiri, ditengah lingkungan dan suasana asing; mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi kemudian pelan-pelan Gurutta bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti itu, terutama setelah isterinya (Puang Hawa) dan anak pertamanya (Muhammad Ali Ruysdi Ambodalle) juga dibawa masuk hutan dari Pare-Pare; sekitar enam bulan setelah gurutta diculik.

⁴⁵ Sejak dari Desa Ranteballa, sudah mulai mengajar orang-orang ikut dengannya dan yang menjadi pengawalnya. Setelah dipindahkan ke Kampong Soro, Gurutta membuka pesantren. Bahkan, di Bajo, Palopo Selatan, Gurutta membuka perguruan tinggi yang dinamai *al-Qasas*. Konon, Di Sumpakburungan, diadakan pendidikan yang disebut dengan "Kader Forming" di mana semua Perwira DI/TII mengikutinya, termasuk Kahar Muzakkar sendiri.

⁴⁶Memang Gurutta diberikan berbagai jabatan bergengsi oleh Kahar Muzakkar. Bahkan konon sempat memangku jabatan wakil Presiden. Tetapi itu tidak berarti Gurutta sejalan dengan Kahar Muzakkar. Tetap saja sebagai tawanan. Sama sekali tidak ada kesempatan dan peluang untuk keluar kembali ke kota. Dia selalu di kawal dengan ketat. Gurutta sendiri tidak pernah menikmati segala macam jabatan itu. Yang membuat Gurutta bertahan adalah kesibukannya mengajar dan mendik orang. Dari aktivitasnya itulah Gurutta mempunyai pengikut (pasukan sendiri) yang sangat setia kepadanya, yang tidak pernah mau meninggalkannya; di luar orang-orang yang memang secara sengaja, sukarela ikut masuk dan mendampingi Gurutta di hutan.

⁴⁷ Salah satu peristiwa yang bisa memberikan gambaran tentang perbedaan pandangan dan sikap keagamaan antara Gurutta dengan Kahar Muzakkar adalah perdebatan antara Gurutta dengan Kiai Maksum. Kiai Maksum adalah seorang ulama asal Jawa yang dibawa oleh Kahar Muzakkar ke hutan;

mendidik. Di hutan Gurutta tetap menikmati mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tampaknya itulah jalan dipilihnya dan digelutinya dengan sepenuh hati. Dia sepenuhnya mengabdikan untuk pendidikan. Maka diapun menjalani kehidupan di hutan, yang sulit, dengan bergairah.

Gambar Kedua

Peristiwa lain yang menggambarkan karakter Gurutta adalah ketika beliau bergabung dengan Golkar, pada pertengahan tahun 1970-an. Peristiwa itu telah menimbulkan goncangan besar dalam tubuh DDI. Pada masa itu adalah era pemerintahan Orde Baru⁴⁸ yang sangat refresif. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pembangunan

konon adalah Guru Kahar Muzakkar, ketika bergerilya di Pulau Jawa melawan Belanda. Perdebatan itu terjadi di Sumpakburungang, Wajo. Konon Kiai Maksum memang diutus oleh Kahar Muzakkir untuk menghadapi Gurutta. Perdebatan itu sekitar penafsiran atas QS al-Nisa (4). Kiai Maksum, sesuai dengan pandangan Kahar Muzakkar, dengan menafsirkan ayat tersebut, mengatakan seorang laki-laki bisa mempunyai isteri sampai Sembilan orang. Tentu saja pandangan semacam itu ditolak oleh Gurutta, karena itu adalah tafsir yang tidak lazim. Dalam sebuah kesempatan, al Marhum Dr. Rusydi Ambodalle (putra tertua Gurutta yang ikut bersama Gurutta selama bertahun-tahun di hutan) yang ikut menyaksikan peristiwa itu, bercerita bahwa situasinya, ketika debat itu berlangsung, sangat menegangkan. Gurutta dan Kiai Maksum duduk berhadapan, ditempat terbuka, dengan dua kelompok pasukan pengawal yang bersenjata lengkap, yang masing-masing berdiri dibelakang keduanya dengan sikap siaga. Sebagaimana diketahui, karena aktivitas pendidikan yang dilakukannya, selain orang-orang yang memang secara sukarela mau ikut Gurutta ke hutan, juga ada dari kalangan pasukan Kahar Muzakkar yang kemudian menjadi murid dan menjadi pengikut setia Gurutta. Mereka itulah, bersama-sama memang ikut Gurutta ke hutan, yang selalu mengawal kemanapun Gurutta pergi. Jumlahnya memang terbatas, tetapi sangat solid dan setia. Kelompok itu menjadi semacam pasukan khusus yang mengawal Gurutta. '... seperti orang mau perang ...', kata Rusydi menggambarkan suasana pada saat itu. Ketika Kiai Maksum mengatakan bahwa arti atau makna penggalan ayat 4 (*matsna wa tsulatsa wa ruba*) surah al Nisa adalah '.... dua tambah tiga tambah empat ...', yang membawa kepada kesimpulan bahwa jumlah isteri seorang laki-laki yang dibolehkan adalah sembilan orang, Gurutta memukul ringan paha (nabampai poppanna) Kiai Maksum, seraya berkata 'kenapa anda berkata seperti itu'. Kiai Maksum tentu saja berkelit dengan berbagai argument, yang dalam pandangan Gurutta mengada-ada; karena penafsirannya itu tidak lazim. Perdebatan tidak dilanjutkan karena waktu dan situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi, konon dalam sebuah kesempatan, ketika keduanya bertemu kembali setelah bebas dan keluar dari hutan. Kiai Maksum meminta maaf kepada Gurutta. Kiai Maksum mengatakan "... saya tidak mempunyai pilihan, saya harus mengatakan seperti itu .. karena saya adalah orang asing .. saya adalah orang Jawa .. jika saya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kehendak Kahar, maka kepala saya bisa dipenggal seketika ...". "Gurutta ... ", kata Kiai Maksum lebih jauh, " .. adalah tokoh yang memiliki kharisma kuat dan pengaruh besar di Sulawesi .. maka meskipun berbeda dengannya, berkata lain dari kemauannya, Kahar tidak akan berani (mungkin tidak mau) bertindak keras dan ekstrim ... ". Tetapi kenyataannya kemudian, sesudah peristiwa itu Gurutta 'diasingkan' ke Sulawesi Tenggara.

⁴⁸ Pemerintah Orde Baru, disingkat Orba, adalah masa pemerintahan Soeharto, Presiden kedua RI. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama, disingkat Orla, yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, ketika Soeharto meletakkan jabatan sebagai

yang mengejar pertumbuhan ekonomi; dan bagi Orde Baru, pembangunan bisa berjalan, jika keamanan stabil. Dengan model pembangunan seperti itu Ekonomi Indonesia memang bertumbuh⁴⁹. Tetapi, dengan pendekatan penekanan pada stabilitas kemananan, pemerintah bertindak refresif. Bisa dikatakan, atas nama pembangunan, pemerintah Orba bertindak sewenang-wenang. Apa maunya itu yang jadi. Orde Baru bisa begitu, karena juga menguasai parlemen, melalui Golkar⁵⁰. Waktu itu hanya ada tiga kekuatan politik di Indonesia yang dibolehkan bermain dipanggung politik praktis⁵¹; yakni (1) Golongan Karya (Golkar); (2) Partai Persatuan Pembangunan; (3)

Presiden RI, setelah bangunan perekonomian Indonesia runtuh, diterpa resesi; yang sebelumnya dianggap berkembang pesat, meskipun pada waktu sama praktik korupsi juga merajalela.

⁴⁹ Pembangunan di Indonesia, zaman Orde Baru, diselenggarakan berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita); yang disusun dalam beberapa tahap perlimatahun : ada Pelita I (April 1969-Maret 1974), menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru, dipandang berhasil menekan inflasi menjadi 47 %, yang sebelumnya (awal Orde Baru) mencapai 60%; Selanjutnya, Pelita II (April 1974-Maret 1979) berhasil menekan inflasi turun sampai 9,5%; Pelita III (April 1979-Maret 1984) tetap berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan; Pelita IV (April 1984-1989) menitik beratkan pembangunan sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri (untuk menghasilkan mesin industry sendiri). Tetapi di tengah berlangsung pembangunan Pelita IV, awal 1980, terjadi resesi. Pembangunan tertolong, dapat berlanjut, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal; Pelita V (April 1989-Maret 1994), membawa pertumbuhan ekonomi sampai sekitar 6,8% per tahun; Pembangunan pada Pelita VI (April 1994-Maret 1999), menekankan sektor ekonomi yang dikaitkan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya; sebagai penggerak pembangunan. Tetapi pada periode ini, 1997, kembali terjadi krisis moneter di Asia. Lebih parah, membuat bangunan perekonomian Indonesia runtuh dan proses pembangunan macet. Harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Ternyata landasan pembangunan itu, selama Orba, tidak cukup kuat, mungkin karena bergantung pada utang luar negeri. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998—atas desakan demonstran yang pada awalnya dipimpin Mahasiswa—tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk ke ketujuh kalinya, dan menyerahkan kedudukannya kepada sang Wakil Presiden B.J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

⁵⁰ Golkar, atau Golongan Karya, adalah partai pemerintah, atau pendukung utama pemerintah Orde Baru, menguasai parlemen.

⁵¹ Setelah pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru, 1973, pemerintah melakukan penyederhanaan atau fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program; sejak masa itu parpol tidak lagi didasarkan pada ideology tertentu yang jelas; atau ideology tunggal, yakni 'pembangunan'. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah : Partai Golongan Karya (Partai Pemerintah); Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo; Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan Gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan PERTI. Penyederhanaan parpol ini dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde Baru menganggap bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Itulah yang menghalangi sehingga pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Jadi Orde Baru menginginkan keseragaman, untuk mengontrol keadaan. Untuk mendukung itu Orde Baru juga memberikan peran ganda kepada ABRI, dengan jatah kursi di MPR dan DPR dalam jumlah yang cukup

Partai Demokrasi Indonesia. Golkar adalah partai pemerintah yang mendominasi parlemen⁵². Dua lainnya, bukan partai pemerintah tetapi juga bukan oposisi. PPP, meskipun bukan oposisi, tampil beda. Mereka tampil dengan kritis atau mungkin lebih tepat disebut heroik⁵³. Dengan sikapnya itu, PPP meraih simpati dan memperoleh dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia⁵⁴. PPP menjadi symbol perlawanan rakyat, dan symbol Islam yang dipinggirkan. Maka dalam pandangan masyarakat, kalau ada orang, apalagi tokoh yang tidak masuk atau tidak menjadi bagian dari PPP, maka sikap keagamaannya di pertanyakan.

Dalam situasi seperti itu, Gurutta justeru memilih menerima tawaran masuk Golkar. Tentu saja hal itu menimbulkan goncangan besar, khususnya pada masyarakat DDI. Mereka memprotes keputusan Gurutta. Hal yang tidak biasa terjadi dalam masyarakat DDI. Mereka tidak bisa menerima keputusan itu, meskipun Gurutta sudah menjelaskan bahwa itu dilakukannya untuk kepentingan DDI. Pada umumnya menganggap bahwa keputusan Gurutta itu mencederai masyarakat, khususnya masyarakat DDI, yang sudah memperoleh perlakuan tidak adil. Keputusan itu juga dianggap mencoreng nama Gurutta sendiri, sebagai Maha Guru dan panutan, yang cemerlang. Situasinya memanas. Tampaknya memang ada juga pihak-pihak yang melakukan provokasi—sehingga memicu reaksi keras dari tokoh-tokoh, para kader dan santri DDI—yang kemudian menempatkan Gurutta seperti berhadapan dengan murid-muridnya sendiri⁵⁵. Santri Ujung Lare dimobilisir meninggalkan Pondok Pesantren Ujung Lare, Pare-Pare, sehingga kosong. Peristiwa itu membuat Gurutta seperti

untuk membantu Golkar, yang menjadi partai pemerintah yang berkuasa, mengontrol Parlemen. Peran Fraksi ABRI sangat menonjol, terutama pada masa-masa awal Orde Baru. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang disebut 'massa mengambang'. Kebijakan ini menetapkan parpol hanya mempunyai kepengurusan sampai pada tingkat kecamatan (tidak ada kepengurusan di tingkat desa). Pada dasarnya kebijakan ini memotong hubungan Parpol dengan basis massanya. Tetapi Golkar memperoleh keuntungan dengan kebijakan ini. Golkar tetap bisa berhubungan langsung dengan basis massa melalui aparat birokrasi dan militer ada ada dibawah kontrolnya. Pada dasarnya kebijakan ini memotong hubungan Parpol dengan basis massanya. Tetapi Golkar memperoleh keuntungan dengan kebijakan ini, tetap bisa berhubungan langsung dengan basis massa, melalui aparat birokrasi dan militer ada dibawah kontrolnya.

⁵² Golkar bisa menguasai Parlemen karena mereka, melalui aparat pemerintah, bisa mengontrol jalannya pemilihan umum. Maka Golkar, selama era Orde Baru, selalu menang mutlak dalam pemilu dan selanjutnya mendominasi Parlemen.

⁵³ PPP, misalnya, melakukan walk out untyuk menolak kebijakan pemerintah di Sidang MPR, misalnya, UU Perkawinan

⁵⁴ Meskipun meraih simpati dan mendapat dukungan banyak, tetapi tidak pernah bisa memenangkan pemilihan umum; karena tidak bisa mengawal jalannya pemilu yang di kontrol oleh pemerintah.

⁵⁵ Padahal sesungguhnya yang berhadapan sejak awal adalah santri dengan Golkar plus pemerintah setempat, yang selalu memaksakan kehendak menjelang dan dalam proses pemilu.

ditinggal oleh santrinya, dan itu tampaknya melukai Gurutta. Begitu dalam melukai sampai terbesit dalam pikiran Gurutta untuk pergi, meninggalkan Sulawesi.⁵⁶

Kalau Gurutta pergi meninggalkan daerah basis gerakannya⁵⁷, dengan pilar-pilar⁵⁸ dan bangunan gerakannya⁵⁹, sulit membayangkan apa yang terjadi dengan DDI satu keseluruhan. Pemerintah Orba dan Golkar sendiri—meskipun Gurutta sudah menyatakan diri bergabung dengan Golkar—tidak akan memperoleh apa-apa, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, daerah basis DDI. Oleh karena itu, beberapa tokoh Golkar cepat bertindak begitu mengetahui suasana hati Gurutta. Bersama dengan tokoh-tokoh DDI yang berpikiran jernih, kemudian menemui Gurutta agar tidak meninggalkan Sulawesi, dan menyediakan sebuah tempat bagi Gurutta di Kabalangan, Pinrang. Di Kabalangan kemudian Gurutta, secara pelan dan pasti, kembali membangun sebuah Pondok Pesantren yang kemudian membesar dan megah dan pada gilirannya menjadi salah satu pilar gerakan DDI.⁶⁰ Seiring dengan itu kepercayaan dan kecintaan masyarakat DDI kepada Gurutta juga kembali seperti semula.

Peristiwa bergabungnya Gurutta dengan Golkar sampai sekarang tetap meninggalkan tanda tanya bagi sebagian besar orang. Tetapi kalau kita mau berpikir jernih, mencoba menganalisisnya sampai jauh kebelakang mencari akarnya, maka peritiswa sesungguhnya memberikan gambar yang utuh tentang karakter (kepemimpinan) Gurutta sebagai seorang ulama. Disitu Gurutta menunjukkan totalitas, pengabdian tanpa pamrih, keikhlasan, dan (kesiapannya melakukan) pengorbanan.

Seperti yang digambarkan diatas, pemerintah Orba, dengan ujung tombak Golkar, sangat berkuasa. Menentukan hitam-putihnya sesuatu perkara. Sementara Gurutta, pernah berada dalam DI/TII Kahar Muzakkar. Gurutta memang diculik, atau dipaksa bergabung. Tapi dalam kaca mata pemerintah (yang otoriter) itu bisa dibaca lain (sesuai dengan kehendaknya saja). Faktanya adalah Gurutta bergabung dengan DI/TII dalam waktu yang relatif cukup lama, bahkan dengan beberapa jabatan bergensi pernah disandangnya. Sedangkan Kahar Muzakkar bersama DI/TII dimata pemerintah adalah pemberontak. Maka, dalam kaca mata pemerintah, orang yang pernah bergabung dengan Kahar Muzakkar dalam DI/TII juga bisa dicap sebagai

⁵⁶ Konon Gurutta memang bersungguh-sungguh mau meninggalkan Sulawesi, tujuannya adalah Kalimantan Timur, dan masyarakat DDI di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda dan Tenggarong, yang mendengar kabar itu, sudah siap menyambut Gurutta.

⁵⁷ Masyarakat dimana beliau sudah mengakar dalam.

⁵⁸ Institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangunnya, khususnya pondok pesantren Mangkoso dan Ujung Lare yang menyajarah dan menyatu dirinya.

⁵⁹ DDI sendiri sebagai sebuah institusi yang memayungi gerakannya pendidikan dan da'wahnya.

⁶⁰ Setelah membesar Pondok Pesantren Kabalangan, di bawah penangangan langsung Gurutta, berkembang menjadi salah satu pilar gerakan DDI bersanding dengan Mangkoso dan Ujung Lare; memproduksi santri dan guru yang dikirim ke berbagai daerah untuk memperkuat gerakan pendidikan dan dakwah DDI di daerah tersebut.

pemberontak. Bisa dijerat dengan UU Subversi yang berlaku saat itu. Maka bisa dibayangkan situasi seperti apa yang dihadapi Gurutta pada masa itu. Kalau Gurutta, ketika ditawarkan, menolak masuk Golkar, maka sungguh-sungguh Gurutta berada dalam ancaman serius. Banyak hal yang bisa terjadi⁶¹. Pada masa itu ada banyak tokoh yang menentang pemerintah, dijebak, kemudian setelah didakwa, dinyatakan bersalah, diisolir, dibatasi ruang geraknya; atau bahkan ada yang dihabisi. Ada berbagai cara yang digunakan, mulai dari yang paling kasar sampai kepada yang sangat halus, untuk menjebak seorang tokoh. Apalagi, dengan system kekuasaannya yang mutlak⁶², pemerintah bisa memancing pengkhianatan orang-orang terdekat yang ambisius. Jadi ada banyak kemungkinan bisa terjadi, yang menempatkan Gurutta pada posisi sulit, jika menolak bergabung dengan Golkar.

Dengan membaca situasi seperti itu maka Gurutta memang tampaknya tidak mempunyai pilihan, selain bergabung dengan Golkar. Kalau saja Gurutta menolak bergabung dengan Golkar, dengan posisinya sebagai orang yang pernah bergabung dengan Kahar Muzakkar—suka atau tidak suka, rela atau tidak rela—maka Gurutta bisa memperoleh stigma, di cap sebagai ‘bekas pemberontak’. Dengan cap seperti itu, paling tidak, akan mendapat pengawasan ketat; ruang gerak dibatasi. Dengan cap seperti itu, dengan sedikit salah melangkah—atau didorong untuk salah melangkah

⁶¹ Kalau kita melihat cerita-cerita masa lalu, pada masa pemerintah Orde Baru, banyak tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok (kegamaan) yang mencoba menolak kebijakan pemerintah di jebak, melalui permainan intelejen yang canggih, dan kemudian dihabisi. Misalnya kasus tanjung periok, September 1984, Ratusan orang jamaah Mushalah as Sa’adah tewas di bantai, termasuk Amir Biki, pemimin kelompok ini. Pristiwa ini dipicu oleh provokasi dua orang petugas Koramil yang masuk ke Masjid tanpa melepas alas kaki. Padahal Amir Biki itu adalah sekutu awal Orde Baru. Peristiwa lainnya, pembantaian penduduk Way Jepara, Lampung, hanya karena ada dugaan bahwa di kampung itu ada kelompok pengajian yang mau menggantikan Pancasila dengan Islam. Barangkali tidak seekstrim itu, mengingat karakter Gurutta, orang yang selalu berperasangka baik terdapat orang lain. Tetapi sangat mungkin Gurutta di jebak, dengan sesuatu cara atau rumor, yang bisa dikaitkan dengan Kahar Muzakkar atau DI-TII. Bisa apa saja, mulai dari yang ringan-ringan (misalnya ketika memberikan pengajian, ada orang bertanya menjurus dan menjebaknya untuk memberikan pernyataan tertentu, yang bisa ditafsirkan bahwa beliau merancang sesuatu, atau mendukung gerakan tertentu yang bertentangan dengan pemerintah) sampai kepada pembicaraan-pembicaraan serius yang terbatas. Pada masa itu semuanya bisa terjadi.

⁶² System kekuasaan yang mutlak, yang dikembangkan Orba mengerucut keatas, semakin keatas semakin kecil. Maka akses atau pintu menuju sukses dalam berkarir, untuk berkembang dalam masyarakat atau institusi, selalu terbatas. Orang-orang sulit meraihnya kalau tidak mempunyai jalur-jalur tertentu. Orang-orang mengalami kesulitan mengembangkan diri, membangun karier atau meraih posisi, atau memperkuat power, kalau tidak memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang yang disekitar kekuasaan pemerintah itu. Dalam situasi seperti juga mencuat keatas budaya pragmatis (mungkin juga sengaja ditanamkan). Orang-orang yang ambisius biasanya dengan mudahnya berkhianat. Kekuasaan memang juga selalu memberikan umpan (kedudukan-kedudukan atau posisi-posisi tertentu) untuk memancing orang-orang ambisius meninggalkan sarangnya yang telah membesarkannya; atau, dia tetap ada disitu dan diberi kekuasaan untuk mengontrol sarangnya itu. Jadi ada banyak kemungkinan terjadi, yang bisa menyudutkan Gurutta.

sehingga tertuduh merencanakan makar⁶³--ada berbagai kemungkinan yang terjadi. Paling serius adalah dijerat dengan UU Subversive. Paling ringan adalah diisolasi. Kalau itu terjadi maka bukan hanya Gurutta dan keluarganya yang terisolasi, tetapi juga DDI. Itu hampir pasti berdampak buruk bagi DDI. Bukan hanya DDI sebagai sebuah organisasi, tetapi juga kader, santri, bahkan masyarakat DDI bisa mengalami kesulitan (dengan nama DDI) dalam upaya mengembangkan diri. Bisa dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan negara⁶⁴.

Risiko, pilihan bergabung dengan Golkar, bukannya tidak diketahui oleh Gurutta; sama juga adanya risiko jika menolak bergabung dengan Golkar. Pilihan itu tentu itu dilakukan dengan pertimbangan matang, dan setelah memohon perlindungan dan petunjuk Allah SWT. Tetapi Gurutta memilih mengorban diri sendiri, bukan mengorban kepentingan orang banyak, yang lebih besar. Sebenarnya Gurutta sudah mencoba menjelaskan alasannya. Tetap saja orang-orang tidak bisa atau tidak mau menerimanya; mungkin karena situasi social-politik pada masa itu sehingga orang tidak bisa memahami dan menerima alasan Gurutta. Tetapi karena kecintaan kepada DDI, kesetiaan kepada cita-cita, keteguhan dasar pijakan, serta keikhlasan dalam pengabdian, maka Gurutta memilih untuk dicerca dan di tinggal. Gurutta sesungguhnya mempertaruhkan namanya dan posisinya dalam masyarakat. Dan memang untuk sesaat, Gurutta seperti jatuh dari puncak, terprosook kebawah, lalu terhempas ke lantai paling bawah dari bangunan yang dibuatnya.

Kalau dilihat dengan kaca mata yang jernih, sebenar itu adalah pengorbanan yang sangat besar, tak ternilai harganya⁶⁵. Peristiwa itu menunjukkan totalitas dan keikhlasan Gurutta dalam pengabdian, keteguhannya pada tempatnya berpijak dan pada cita-citanya. Gurutta mengambil sikap dan tindakan yang tidak populer,

⁶³ Misalnya dalam sebuah pengajian, atau dalam sebuah pertemuan terbatas, Gurutta ditanya tentang sesuatu perkara dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring memberikan jawaban-jawaban yang bisa ditafsirkan mengarah kepada mengancam atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah; sebagaimana banyak yang menimpa beberapa tokoh pada masa itu. Seorang anggota DPR-RI, Fraksi PPP, ulama asal NTB, bernama KH Zainuddin MA, dituduh menjadi bagian dari satu kelompok yang merencanakan makar, hanya karena ikut dalam pertemuan terbatas; padahal sesungguhnya dia hanya salah seorang undangan dari pertemuan itu. Sehingga di copot dari kedudukannya sebagai anggota DPR-RI dan dihukum.

⁶⁴ Mungkin sulit membayangkan situasi seperti itu bisa terjadi pada masa sekarang, di zaman keterbukaan. Tetapi di masa lalu banyak kejadian seperti itu. Banyak orang mengalami kematian perdata, atau terkucilkan, karena cap-cap tertentu. Kita bisa melihatnya pada kasus orang-orang yang di cap sebagai PKI atau dicap terkait dengan PKI (anak, menantu, keponakan, dan lain-lain) — padahal jelas-jelas tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan PKI--yang mengalami kematian perdata.

⁶⁵ Belakangan sayapun faham apa ma'na dari jawaban Ayahanda saya, Prof. KH. Ali Yafie, ketika saya dulu bertanya "kenapa Gurutta masuk GOLKAR?"; beliau ketika itu terdiam sejenak dan kemudian menjawab singkat (dalam bahasa Bugis), "Gurutta itu bukan orang sembarangan, dan tindakan itu juga tidak sembarangan". Dulu, sebagai remaja, saya tidak begitu faham makna dari pernyataan itu.

berlawanan dengan arus utama dalam masyarakatnya, dengan resiko yang kemudian terlihat—dicerca dan ditinggal—untuk kepentingan masyarakatnya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Gurutta telah melepaskan diri dari sikap mementingkan diri dan menonjolkan diri. Gurutta menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan dan misi besar yang diyakininya. Gurutta berkorban untuk keberlanjutan gerakan pendidikan dan da'wah yang dibangunnya bersama kawan-kawannya, untuk masa depan murid-muridnya dan untuk keberadaan masyarakatnya. Itu sesungguhnya adalah karakter Ulama, atau karakter kepemimpinan Ulama. Itu adalah jalan para Nabi, dan Ulama adalah ahli waris para Nabi.

Mungkin itu juga adalah makna lain dari kata-kata yang sering di ucapkan Gurutta : 'anukku anunna to DDI, anunna DDI tannia anukku' (milik saya juga adalah milik DDI, tetapi milik DDI bukanlah milik saya). Bahwa segala yang diupayakan dan diusahakannya adalah untuk kepentingan DDI, atau untuk menunjang keberadaan dan keberlanjutan DDI; sebagai gerakan dengan sebuah misi dan cita-cita pendidikan dan dakwa yang berdasar pada pandangan keagamaan tertentu (Islam Ahlussunnah wal Jama'ah). Dan itu di tunjukkan sampai akhir hayatnya.